

**ANALISIS SERUAN RAKYAT PAPUA ATAS KONFLIK PERAMPASAN SUMBER
DAYA ALAM DI PAPUA: RESPONS SOLIDARITAS INTERNASIONAL DAN
PERAN DEWAN HAM, PBB**

Hulu y. kobak

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

E-mail: hulu.kobak@stekumene.ac.id

Abstrak

Seruan hak suara rakyat Papua merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan struktural yang dialami masyarakat adat, khususnya terkait masuknya perusahaan-perusahaan tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam di Papua. Isu ini tidak hanya menjadi persoalan lokal, tetapi juga telah menarik perhatian internasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis seruan rakyat Papua atas konflik perampasan sumber daya alam yang terus berlangsung, serta mengkaji respons solidaritas internasional dan peran Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam isu ini. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap buku, jurnal, dokumen resmi, laporan HAM, pernyataan solidaritas internasional, serta publikasi dari gereja dan organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seruan moral rakyat Papua merupakan ekspresi perlawanan terhadap praktik eksploitasi yang melanggar hak atas tanah, identitas budaya, dan lingkungan hidup. Seruan ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga menembus batas global dan memperoleh dukungan dari berbagai aktor internasional, termasuk gereja dunia, lembaga HAM, dan kelompok solidaritas sipil. Di sisi lain, Dewan HAM PBB dinilai belum mengambil langkah konkret meskipun telah menerima berbagai laporan pelanggaran HAM di Papua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjuangan rakyat Papua untuk mempertahankan tanah dan masa depan mereka tidak dapat dipisahkan dari perlindungan atas sumber daya alam dan tekanan terhadap mekanisme global seperti PBB demi terciptanya keadilan dan keberlanjutan masa depan Papua.

Kata Kunci : Seruan Rakyat Papua, Perampasan Sumber Daya Alam, Solidaritas Internasional, Dewan Ham PBB.

PENDAHULUAN

Papua merupakan salah satu wilayah yang paling kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Keanekaragaman hayati, hasil tambang, minyak, dan gas bumi menjadikan Papua sebagai aset penting dalam perekonomian nasional (Chauvel, 2005). Namun, di tengah kekayaan tersebut, masyarakat Papua sering kali menghadapi ketidakadilan sosial, ekonomi,

dan politik¹. Diskriminasi struktural, marginalisasi dalam pengambilan keputusan, dan keterbatasan akses terhadap pembangunan telah menciptakan ketimpangan serius. Dalam konteks ini, pernyataan tegas oleh: (I Nyoman Sudira,dkk) bahwa, marginalisasi dan depopulasi yang berlangsung. Tidak sulit mengamini klaim teoritis yang mengatakan bahwa mereka yang mengalami perampasan dan kehilangan hak milik, termasuk yang asasi seperti hak hidup dan hak untuk menjaga identitas kultural, akan bersuara, melawan, dan memberontak akan keadilan². Ungkapan ini bukan sekadar luapan emosional, melainkan refleksi atas keyakinan masyarakat papua akan kapasitas mereka untuk berdiri sendiri. Dalam konteks kesejarahan sesungguhnya kita amat beruntung, karena perancang undang-undang dasar 1945 oleh Prof. Soepomo, adalah seorang pakar hukum adat, yang benar-benar mengetahui posisi masyarakat adat di Indonesia, sehubungan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya banyak dipersoalkan yang mempertimbangkan.³

Faktor penyebabnya adalah karena jaminan tersebut sudah dianggap seyogianya demikian, sebagian juga republik indonesia masih sibuk dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun, terhadap perlindungan eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat papua merosot tajam sejak tahun 1960, seiring dengan meningkatnya kepentingan negara atau pribadi terhadap sumber daya alam, yang dampak merusak dalam wilayah hak masyarakat papua⁴, Indahnya alam papua begitu ada maka masyarakat papua sendiri sudah nyaman dengan alam itu. Selain itu, pernyataan ini mencerminkan betapa pentingnya peran papua dalam struktur ekonomi nasional papua memiliki potensi besar untuk mengelola sumber daya alamnya secara mandiri.⁵ Namun, perjuangan untuk menentukan nasib sendiri terus berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan politik nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih jauh alasan di balik keyakinan tersebut serta memahami potensi dampak konflik berkaitan erat dengan kehidupan manusia.

¹Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, Dan Diaspora Papua, Pamungkas Cahyo, Rusdianti Suma Riella

² Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua Didukung Oleh (I Nyoman Sudira, Cahyo Pamungkas, Fachri Aidulsyah, Elvira Rumkabu, Yuliana Langowuyo) 2020]

³ Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Darwin Ginting 2012)

⁴ Penciptaan Karya Seni Berbasis Kearifan Lokal Papua. Prof. Dr. I Wayan Rai S., M.A.[2021]

⁵ Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Kusum Nurul Rahmah, Ida Hamida, Nusantari Fitriani [2022]

Fenomena yang diangkat dan meneliti *Tambang Emas di Blok Wabu*. Dampak langsung dari konflik bersenjata yang berkepanjangan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, adalah gelombang pengungsian masyarakat sipil. Pada akhir Maret 2025, warga dari Kampung Janamba terpaksa mengungsi ke wilayah-wilayah sekitar seperti Hitidipa, Sugapa, dan kompleks Paroki setempat, setelah mendengar rentetan tembakan dan keberadaan helikopter serta pesawat militer di sekitar Pos TNI Migatapa.⁶ Sehingga sebagian masyarakat memilih bertahan di kampung asal mereka, namun dengan situasi penuh ketakutan dan ketidakpastian. Blok Wabu, yang berada di wilayah adat masyarakat Intan Jaya, menyimpan potensi emas dalam skala besar dan menjadi salah satu cadangan strategis yang sebelumnya dikuasai oleh PT Freeport Indonesia. Setelah dikelola oleh negara melalui anak perusahaan BUMN, lokasi ini mengalami militerisasi yang signifikan, dengan pembangunan pos keamanan dan patroli bersenjata yang meningkat kondisi ini⁷. Ketakutan dan trauma kolektif masyarakat lokal pengungsian massal ke wilayah-wilayah aman seperti kompleks paroki dan kampung tetangga disrupti layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal fragmentasi sosial dan ketegangan antar komunitas. Peristiwa di Intan Jaya menunjukkan bahwa perampasan sumber daya alam di Papua bukan hanya soal eksploitasi ekonomi, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak atas rasa aman, tanah adat, dan kelangsungan hidup masyarakat. Seruan rakyat Papua kepada komunitas internasional, termasuk Dewan HAM PBB, mencerminkan keinginan untuk menghentikan logika kolonial dan militeristik dalam pembangunan.

Fenomena selanjutnya “Tambang NIKEL RAJA AMPAT, Provinsi Papua Barat Daya. yang melaporkan dari “SORONG, ODIYAIWUU.com. Sejumlah elemen masyarakat yang terhimpun dalam Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Domberai, Rabu (11/6) merespon keterangan pers pemerintah terkait protes sejumlah elemen dan pegiat lingkungan hidup.⁸ Masyarakat, khususnya di Papua Barat Daya, menyampaikan keprihatinan terhadap keberadaan sejumlah perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat. Koordinator Umum Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Domberai, Torinus Kalami, menyatakan bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam pernyataan persnya menyebut bahwa lokasi Gag Nikel tidak berada dalam kawasan geopark Raja Ampat dan berjarak sekitar 40 kilometer dari Piaynemo. Namun,

⁶ Antara Pengungsi Di Intan Jaya Dan Tambang Emas Di Blok Wabu | Jubi Papua Domingus A Mampioer Tahun (2025)

⁷ Implikasi Desentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung Andri Yanto, Fadila Salbilla, Risky Carmil Sitakar/2023]

⁸ Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Segera Cabut Izin Pt Gag Nikel Di Raja Ampat Odiyaiwuu.Com

masyarakat mempertanyakan mengapa pemerintah tetap mempertahankan izin usaha pertambangan (IUP) PT Gag Nickel, yang merupakan BUMN, meskipun keberadaannya dinilai merusak lingkungan, sehingga tidak mencabut ?

Masyarakat mendesak pemerintah dan kementerian terkait untuk segera mencabut izin PT Gag Nickel karena dinilai mengancam kelestarian lingkungan alam Raja Ampat. Koalisi keselamatan manusia dan alam, juga menyatakan bahwa keberadaan sejumlah perusahaan tambang di kawasan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.⁹ Selain itu, mereka mendesak pemerintah agar segera melakukan investigasi terhadap penerbitan izin tambang di Raja Ampat yang diduga penuh dengan praktik korupsi. Koalisi juga menyerukan pencabutan kebijakan-kebijakan yang mengancam lingkungan, serta meminta agar pemanfaatan sumber daya alam Papua dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan penghormatan masyarakat lokal setempat dan terhadap hak asasi manusia HAM dan menuntut dihentikannya pelaksanaan proyek strategis nasional di seluruh wilayah tanah Papua.¹⁰

Dalam artikel ini tujuan dari peneliti dengan berdasarkan judul mengkaji secara kritis seruan rakyat Papua dalam menghadapi konflik perampasan sumber daya alam yang terus berlangsung sebagai bentuk resistensi terhadap ketidakadilan struktural yang sistematis dan telah lama menggerus ruang hidup, identitas budaya, serta keseimbangan ekologis mereka. Seruan ini tidak hanya mencerminkan perjuangan lokal, tetapi juga menjadi panggilan moral bagi komunitas internasional untuk menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan rakyat Papua. Penelitian ini juga secara khusus menyoroti bagaimana respons solidaritas internasional, terutama melalui peran Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dapat mendorong akuntabilitas negara dalam menghentikan praktik eksploitasi yang merampas hak-hak masyarakat adat, merusak lingkungan hidup, serta memperburuk krisis iklim di kawasan Tanah Papua yang kaya namun rentan. Dengan demikian, artikel ini menghubungkan perjuangan lokal Papua dengan dinamika global tentang keadilan ekologis dan hak asasi manusia.

⁹ Kedudukan Militer Dalam Dinamika Konflik Di Papua (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tni Dan Surat Telegram Rahasia Panglima Tni Nomor Str/41/2024) Amrudiaz Helmana, Nur Habibi

¹⁰ Seperempat Abad Reformasi Catatan Kritis Tentang Ham, Sumber Daya Alam, Dan Politik Fatia Maulidiyanti, Juhari Sasmito Aji Dkk, Haris Azhar Dkk, Sofia Hasna, Ifanul Abidin Dkk, Zamzam Muhammad Fuad Dkk, Ratih Herningtyas, Helen Dian Fridayani Dkk//2024]

METODE PENELITIAN

Kajian atau telaah terhadap suara tuntutan rakyat Papua terkait konflik yang terjadi karena perampasan sumber daya alam di wilayah Papua, serta bagaimana komunitas internasional menunjukkan solidaritasnya dan bagaimana Dewan Hak Asasi Manusia HAM-PBB bisa merespons situasinya. pernyataan resmi masyarakat sipil Seruan Rakyat Papua, kepada (DHPBB). Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola narasi, tuntutan keadilan, serta respons solidaritas kemanusiaan terhadap konflik perampasan sumber daya alam di Papua. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika politik, hak asasi manusia, dan representasi internasional secara mendalam, khususnya dalam kerangka hak atas tanah, lingkungan hidup, dan penentuan nasib sendiri.¹¹

Dalam penulisan artikel ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena relevan untuk menggali secara mendalam dinamika konflik perampasan sumber daya alam di Papua, seruan rakyat sebagai bentuk resistensi, serta response solidaritas internasional, khususnya peran Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Penelitian ini mengandalkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan institusi, dan artikel media daring yang kredibel. Bahan-bahan tersebut terdiri dari konsep-konsep teoritis, pendapat para ahli, serta analisis yang relevan dengan isu yang dibahas. Peneliti kemudian melakukan seleksi dan analisis kritis terhadap sumber-sumber tersebut untuk membangun argumen yang kuat dan mendalam. Dalam pendekatan kualitatif, proses analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif guna memahami secara holistik kompleksitas masalah, serta mengusulkan solusi atau refleksi kritis berdasarkan hasil menuntun penentuan nasib sendiri di dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Secara umum kerangka Konseptual

Seruan Rakyat Papua menunjukkan kepada ekspresi oleh masyarakat pada perlawanan, tuntutan untuk mendapatkan keadilan, dan panggilan moral yang disampaikan oleh masyarakat Papua terhadap berbagai bentuk ketidakadilan, khususnya dalam konteks eksploitasi dan perampasan sumber daya alam. konflik perampasan sumber daya alam dalam proses sistematis

¹¹ Transformasi Gereja Papua Dalam Membangun Masyarakat Multikultural Yang Damai Dan Toleran, Oleh Hulu Kobak//2025

kepentingan individu orang di mana sumber daya alam (tambang, hutan, tanah) dieksploitasi oleh negara atau korporasi tanpa persetujuan partisipasi masyarakat lokal, sehingga menimbulkan konflik sosial, ekologis, dan hak asasi manusia. Solidaritas Internasional, response global (lembaga, gereja, LSM, individu, negara) yang menunjukkan dukungan terhadap perjuangan rakyat Papua melalui advokasi, kampanye, aksi, dan tekanan diplomatik. Peran Dewan HAM PBB, Dewan Hak Asasi Manusia perserikatan Bangsa-Bangsa berfungsi sebagai lembaga internasional yang mengawasi pelanggaran HAM dan dapat menjadi saluran advokasi terhadap kasus-kasus ketidakadilan struktural yang dialami oleh masyarakat adat di Papua.¹²

2. Seruan Moral dan Perlawanan Rakyat Papua

Seruan moral yang disampaikan oleh rakyat Papua merupakan bentuk ekspresi kolektif atas ketidakadilan struktural yang mereka alami, khususnya dalam perampasan sumber daya alam, marginalisasi sosial, dan kekerasan negara.¹³ Seruan ini tidak hanya menjadi bentuk keluhan, tetapi sekaligus merupakan tindakan perlawanan simbolik dan substantif terhadap sistem yang menindas. seruan rakyat bentuk, mulai dari unjuk rasa damai, advokasi melalui media, hingga kampanye internasional yang menyoroti pelanggaran HAM. Dalam kerangka etika sosial, seruan ini mencerminkan suatu panggilan profetik, yakni menyuarakan kebenaran dan keadilan atas nama kemanusiaan dan harkat martabat manusia yang diinjak oleh kekuatan politik dan ekonomi yang hegemonik.¹⁴ jadi pernyataan oleh wakil presiden di atas ini kita melihat dengan kondisi sekarang di tanah papua tidak berwujud, yang terjadi hanya penambahan konflik dan konflik semakin meningkat diatas tanah west papua. Situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua sepanjang tahun 2023 masih belum menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan.

Hal ini terlihat dari data yang dirilis oleh Komnas HAM, yang mencatat setidaknya terjadi 113 kasus pelanggaran HAM di wilayah Papua selama tahun tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi HAM di tanah papua tetap memprihatinkan dan menimbulkan keprihatinan dewan ham PBB. (Hulu K. & Seldjatem, 2024) dalam artikelnya membahas, Situasi ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial di Papua, di mana ketegangan

¹² Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik Diterbitkan 2025, Penulis Oleh: (Yordan Nyamuk Karunggu)

¹³ Peran Aktor Internasional Dalam Melanggengkan Siklus Kekerasan Negara Terhadap Kelompok Subaltern: Studi Kasus Gerakan Separatis Papua Barat Oleh //Agastya Pandu Wisesa. (2023)

¹⁴ Etika Ilmuwan Dalam Kerangka Filsafat Ilmu (Analisis Dan Implikasi)
Susanna Harun & Syamsul Rijal

antara kelompok-kelompok agama dan etnis sering kali diperburuk oleh ketidakadilan sosial dan marginalisasi.¹⁵ Papua, sebagai salah satu wilayah dengan keragaman etnis dan budaya yang tinggi di Indonesia, memiliki dinamika sosial dan kekayaan alam yang begitu indah dan yang unik. (Kobak & Seldjatem, 2024, hlm. 2–3), berkaitan erat dengan perjuangan identitas, martabat, serta keadilan yang dialami oleh masyarakat Papua terhadap sejarah penindasan, marginalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶

Seruan moral rakyat” di sini bukan sekadar ajakan biasa, melainkan sebuah panggilan dan menunjukkan nurani yang muncul dari kesadaran akan ketidakadilan yang terus berlangsung. Seruan ini lahir dari luka kolektif, penderitaan yang terus-menerus, dan kesadaran moral bahwa kehidupan rakyat Papua telah lama diperlakukan tidak adil oleh negara maupun kekuatan-kekuatan ekonomi-politik yang mengeksploitasi tanah mereka. Seruan ini merupakan bentuk kesaksian etis bahwa yang terjadi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar.

3. Respons dan Solidaritas Internasional Atas perampasan Sumber daya Alam Papua

Solidaritas Internasional punya kepentingan yang memiliki peran strategis dalam memperkuat perjuangan rakyat Papua, baik itu melalui tekanan diplomatik, advokasi hak asasi manusia maupun pembentukan opini publik global.¹⁷ sedangkan menurut (*DIMAS HUTOMO SAHANDA*. Dalam Skripsinya mengatakan bahwa; Indonesia tak hanya berdiam diri setiap kali dipojokkan oleh Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLKNS terkait dengan isu Papua melalui forum regional maupun internasional.¹⁸ Dimas hutomo sahanda membahas tentang Isu organisasi yang terjadi di Papua dibentuk namanya (OPM). sedangkan

a. Perampasan Alam Raja Ampat dan adanya tambang NiKEL tahun 2025

Raja Ampat dikenal luas sebagai salah satu kawasan dengan keindahan alam yang luar biasa, bahkan dijuluki sebagai "surga kecil yang jatuh ke bumi." Julukan ini bukan sekadar ungkapan puitis, melainkan cerminan dari kekayaan ekologis, keunikan

¹⁵ Analisis Terhadap Pandangan Pluralisme Dan Eksklusivisme Di Kalangan Gereja-Gereja Di Papua Pada Masa Kini [Hulu K. Cristian Seldjatem] (Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta, Indonesia) //2024]

¹⁶ Analisis Terhadap Pandangan Pluralisme Dan Eksklusivisme Di Kalangan Gereja-Gereja Di Papua Pada Masa Kini [Hulu K. Cristian Seldjatem] (Hlm. 2-3, //2024]

¹⁷ Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, Dan Diaspora Papua, Pemungkas Cahyo, Rusdiarti Suma Reiella Yang Ditulis Oleh Cahyo Pamungkas & Suma Riella Rusdiarti /2017;

¹⁸ Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Negara-Negara Di Kawasan Pasifik Selatan Terkait Organisasi Papua Merdeka Skripsi

biodiversitas laut, dan keindahan lanskap alam yang menjadikan wilayah ini sebagai salah satu ekosistem terpenting di dunia. Bagi masyarakat lokal, alam bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual. Mereka menjalin relasi yang akrab dengan alam, memeliharanya, dan memaknainya sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dihormati.¹⁹

Namun, pada tahun 2025, munculnya ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem Raja Ampat, khususnya melalui eksploitasi tambang GAG NIKEL. sebuah perusahaan ini menghadirkan konflik di tengah-tengah masyarakat dan merusak alam yang ada di Raja Ampat Papua Barat. Karena itu masyarakat Papua Barat menolak dengan tegas bahwa luas dari berbagai elemen masyarakat yang yakni: oleh warga sipil, tokoh adat, tokoh pemuda, perempuan, tokoh gereja, tokoh pemerintah lokal, hingga para tokoh pejuang hak asasi manusia. Mereka menyadari bahwa eksploitasi tambang di kawasan selestari seperti Raja Ampat bukan hanya akan merusak lingkungan, Tetapi juga akan mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada alam. dalam akun dengan “Indonesia Kaya” dia menjelaskan bahwa; Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat. Untuk mencapai wilayah ini, perjalanan umumnya dimulai dari kota Sorong, yang menjadi pintu masuk utama. Wisatawan biasanya menempuh perjalanan udara menuju Sorong, kemudian melanjutkannya dengan kapal cepat menuju Waisai, yang merupakan ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Kapal cepat ini beroperasi dua kali sehari, dan waktu tempuh dari Pelabuhan Sorong ke Pelabuhan Waisai berkisar antara 2 hingga 3 jam.²⁰

Secara geografis, wilayah Raja Ampat terdiri dari gugusan pulau-pulau karang yang tersebar luas. Di antara pulau-pulau tersebut, terdapat empat pulau utama yang paling besar, yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool. Keempat pulau ini menjadi pusat pemukiman awal masyarakat lokal yang sebagian besar menggantungkan hidup sebagai nelayan. Keindahan dan kekayaan bawah laut Raja Ampat menjadi daya tarik utama kawasan ini, bahkan dikategorikan sebagai salah satu dari sepuluh wilayah perairan terbaik di dunia berdasarkan hasil penelitian tentang keanekaragaman hayati

¹⁹ Jangan Rusak Rumah Ku: Save Papua - Mariana Lusia Resubun, Buku//2017

²⁰ Berita Utama ; Jaringan Bahlil Dan Keluarga Papua Dalam Bisnis Nikel Raja Ampat *Odiyaiwuu.Com*
// 16 Juni 2025

laut dan kelestarian lingkungannya. WAISAI - Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya dijuluki sebagai "Surga Kecil yang Jatuh di Bumi". Oleh karenanya, Raja Ampat menawarkan keindahan alam yang eksotis kepada wisatawan. Dikelilingi oleh lautan membuat Kabupaten Raja Ampat juga dikenal sebagai Kabupaten Bahari yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar. Dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat yang dilestarikan secara turun temurun, membuat Raja Ampat menawarkan sejumlah destinasi yang mengagumkan kepada wisatawan.

b. Penambangan Blok Wabu kabupaten Intan Jaya papua

Tambang Emas Blok Wabu kabupaten Intan Jaya, provinsi Papua tengah, merupakan wilayah konsesi tambang emas yang terletak di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kawasan ini dikenal memiliki potensi cadangan emas yang sangat besar dan pernah dikelola oleh PT Freeport Indonesia sebelum diserahkan kepada perusahaan BUMN, yaitu PT Aneka Tambang (Antam) melalui holding industri pertambangan, MIND ID. Namun, rencana eksploitasi tambang ini telah memicu kekhawatiran dan penolakan luas dari masyarakat lokal dan kelompok masyarakat sipil di Papua. lebih khususnya warga sipil Intan Jaya, Artikelnya "Ahmad" ini mengindikasikan bahwa UU ini tak ubahnya hasil negosiasi ulang kepentingan politik-bisnis antara elit penguasa dan para perusahaan raksasa tambang tersebut.²¹ Artinya, jika ternyata dalam aturan pelaksana UU selanjutnya dibuat menjadi lebih fleksibel, sebenarnya UU Minerba yang baru ini mengungkap betapa pemerintah hanya memainkan gimmick politik yang mengelabui opini publik, dimana negara seolah-olah tegas dan berkuasa atas kekayaan tambang nasional di hadapan para korporasi dan pada para provinsi dan kabupaten.

menurut (Ahmad Khoirul Umam dkk), dalam artikelnya menuliskan bahwa Pemerintah seolah tidak mau menyalahkan diri sendiri dan mengungsi di bawah payung norma. Selanjutnya isu sangat kontroversial yaitu ancaman terhadap lingkungan dan sekitarnya akibat kegiatan pertambangan. Perubahan dalam hukum Minerba tampaknya tidak lagi peduli dengan efek yang mengancam jiwa. Terakhir isu keempat yang dinilai sangat berbahaya adalah persoalan hak taipan pertambangan dalam perizinan dan

²¹ Mahasiswa Intan Jaya Tolak Rencana Antam Menambang Blok Wabu (Penulis: Aida Ulim Editor: Aryo Wisanggeni G) Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya Menggelar Keterangan Pers Di Kota Jayapura, Papua, Kamis (23/1/2025), Menyampaikan Penolakan Mereka Atas Rencana Pt Antam Tbk Menambang Blok Wabu Di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.Jubi/

pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dimensi ini sebenarnya merupakan pintu gerbang munculnya kekuasaan²² proses perencanaan masyarakat kabupaten Intan Jaya dalam pengakuan keberadaan masyarakat Adat Intan Jaya, namun dalam realisasinya tidak ada perwujudan nilai yang di dalamnya mengedepankan hak-hak masyarakat adat dan perlindungannya dengan prinsip utama *free and prior informed consent (FPIC)* yang terkandung dalam aturan tersebut dibuktikan dengan masih ada kriminalisasi kepada masyarakat adat yang memperjuangkan haknya serta kurangnya bentuk sosialisasi dan partisipasi yang dilakukan pemerintah kepada Masyarakat Adat.²³

Akibatnya, tambang Emas Blok wabu, ini dipandang sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang dipaksakan dan tidak berkeadilan keprihatinan terhadap proyek tambang. ini juga mendapat sorotan dari komunitas internasional, organisasi HAM, dan lembaga gerejawi yang menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan menghormati hak-hak masyarakat papua. Dalam banyak pernyataan, mereka menegaskan bahwa pembangunan sejati di Papua tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat. Penolakan terhadap tambang Blok Wabu bukan tanpa alasan. Pertama, wilayah ini merupakan tanah adat dan ruang hidup masyarakat Papua, khususnya suku Moni dan suku lainnya yang telah mendiami kawasan itu secara turun-temurun.

Kehadiran tambang dianggap sebagai bentuk perampasan tanah adat dan ancaman terhadap eksistensi budaya serta cara hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada alam. dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan skala besar sangat mengkhawatirkan karena penebangan hutan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem akan berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu hal ini juga memperparah kondisi kemanusiaan di Intan Jaya yang selama beberapa tahun terakhir telah mengalami konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata Papua, sehingga keberadaan tambang berpotensi memperuncing situasi konflik dan ketidakstabilan di daerah intan jaya sendiri.

²² Tantangan Integritas Bisnis Tambang Di Indonesia [Ahmad Khoirul Umam, Ph.D Dr. Iin Mayasari Adrian Azhar Wijanarko, Mm. Emil Radhiansyah, [M.Si// Dkk](#)] 2020

²³ **Tinjauan Ham Internasional Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan) [2017]**

c. Tambang Emas Korowai Kabupaten Yahukimo papua

Wilayah Korowai di Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu kawasan pedalaman Papua yang terkenal karena kekayaan alamnya, termasuk potensi tambang emas yang cukup besar. Kawasan ini juga dikenal karena masyarakatnya yang masih hidup sangat dekat dengan alam, menjaga hutan dan lingkungan sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Korowai mulai menjadi target pemerintah Indonesia untuk eksploitasi tambang emas, baik oleh perusahaan-perusahaan besar maupun oleh penambang ilegal. Kehadiran aktivitas pertambangan di Korowai telah menimbulkan berbagai persoalan yang harus ditangani serius, baik secara ekologis maupun sosial.

Kehancuran alam melalui eksploitasi tambang emas di kawasan ini mengancam hutan hujan tropis yang menjadi bagian dari sistem ekologi penting di Papua. Penebangan hutan, pencemaran air oleh limbah merkuri dan zat kimia lainnya, serta kerusakan tanah sangat berpotensi merusak ekosistem yang telah lama dijaga oleh masyarakat Korowai secara turun-temurun. Menurut "Tokoh-tokoh dan aktivis kemanusiaan dan Laurenzus Kadepa adalah mantan anggota DPR Papua dua periode (2014-2024). menegaskan bahwa; Selama menjabat anggota parlemen, ia kerap membuat peringatan di media tentang potensi konflik dari aktivitas tambang ilegal di Papua. Kepada BBC News Indonesia, Kadepa membagikan sejumlah tautan berita tentang sikapnya menolak tambang ilegal di Papua. Salah satunya dimuat media lokal Jubi TV, Oktober 2023. Jadi biasa [jatuh] korban, tapi aktivitas [tambang] jalan terus... Bagi saya kalau seperti itu, ini nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilainya moral, nilai-nilai etika sudah hilang," kata Kadepa.²⁴

Pemberantasan tambang ilegal di Papua lemah, "Karena illegal mining itu kan menyangkut setoran", klaimnya. "Itu mungkin karena pengaruh tambang emasnya. masyarakat adat Korowai menghadapi tekanan besar dari luar. Banyak dari mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai atau kesempatan untuk menyatakan pendapat atas aktivitas tambang di wilayah mereka. Situasi ini melanggar prinsip dasar hak masyarakat adat, khususnya hak atas tanah ulayat dan hak untuk memberikan persetujuan secara bebas, didahului, dan diinformasikan ketika tambang masuk tanpa

²⁴ Papua: Pendulang Emas Berulang Kali Tewas Di Tengah Konflik Bersenjata Papua, Siapa Mereka Dan Mengapa Ada Di Tengah Hutan? Di Akun Bbc New Indonesia, //2025]

persetujuan atau partisipasi masyarakat, maka yang terjadi adalah perampasan wilayah adat.²⁵ akibat perilaku ekonomi dalam memproduksi, distribusi dan konsumsi mereka mengarah pada kecenderungan penyesuaian diri dan penyesuaian hidup sebagai dampak dari pemaksaan oleh pelaksana dalam mengimplementasikan program-program pemberdayaan ekonomi lokal selama ini dan kecenderungan sistem pemasaran selama ini belum berpihak pada pengembangan ekonomi lokal. kecenderungan perubahan dan pemaksaan tersebut, menimbulkan kemiskinan dan pergeseran dalam struktur masyarakat serta spesifikasi okupasi mereka. Struktur masyarakat yang terbentuk akibat dari perubahan tersebut,

4. Peran dan Tanggung Jawab Dewan HAM PBB Kepada Bangsa Papua

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council) adalah badan antarpemerintah dalam sistem PBB yang memiliki mandat utama untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Dalam konteks Papua, Dewan HAM PBB memikul tanggung jawab moral dan hukum internasional untuk merespons berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi secara sistemik dan struktural selama beberapa dekade. Laporan-laporan dari organisasi internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch (HRW), dan KontraS serta dokumen dari lembaga keagamaan dan masyarakat sipil Papua secara konsisten menyebutkan adanya kekerasan bersenjata, penyiksaan, pembunuhan di luar hukum (*extrajudicial killings*), pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta perampasan tanah adat dalam proyek-proyek ekonomi yang tidak berpihak kepada masyarakat lokal. Pelanggaran ini terjadi di tengah kontrol ketat media dan terbatasnya akses bagi pengamat independen ke wilayah Papua.²⁶

Fungsi Advokasi dan Pemantauan Dewan HAM PBB memiliki peran strategis untuk memantau situasi HAM dan memberikan rekomendasi kepada negara anggota. Dalam hal ini adalah bangsa Papua, Dewan dapat mengambil langkah dengan merespon dan menyelesaikan situasi Papua sebagai agenda resmi di dalam sesi dewan. Keprihatinan atas meningkatnya kekerasan di Papua dan meminta akses untuk melakukan pemantauan. Namun, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum memberikan izin resmi bagi kunjungan tim pencari fakta.²⁷

²⁵ Menyingkap Akar Kemiskinan Dalam Masyarakat Adat Papua Studi Kasus Masyarakat Byak (2019)

²⁶ Office Of The High Commissioner For Human Rights (Ohchr). "Un Human Rights Chief Urges Restraint And Dialogue To Address Papua Unrest." (2019).

²⁷ Ham Komnas. Laporan Kegiatan Seruan Global 2014: Hentikan Stigma Dan Diskriminasi Terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta Dan Anggota Keluarga Mereka

“Menurut Pdt. Trevor Johnson” memiliki permintaan dan pemikiran lanjutan atas kekhawatiran pasca penambangan ilegal, orang-orang korowai bagaimana menambang emas dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan kesehatan orang korowai. Emas Papua harus dikelola oleh orang Papua. Saya memohon ada orang yang memulai proses untuk menjadikan Korowai sebagai wilayah konservasi, sebagai taman nasional. Dengan begitu wilayah ini akan dilindungi. Orang-orang Korowai adalah masyarakat yang unik dan penuh dengan potensi wisata. Banyak brosur wisata Papua memiliki foto rumah pohon orang Korowai di sampulnya. Sungguh memalukan kalau kawasan Korowai dirusak.²⁸

Walau Dewan HAM PBB memiliki kapasitas struktural dan mandat internasional, efektivitasnya sangat tergantung pada dukungan dari negara-negara anggota dan tekanan moral dari masyarakat internasional.²⁹ Dalam kasus Papua, solidaritas global baik dari negara-negara Pasifik (seperti Vanuatu, Solomon Islands), organisasi gereja sedunia, hingga aktivis HAM internasional telah berperan penting dalam mendorong agar isu Papua tidak terabaikan di forum global.³⁰ Namun, lemahnya posisi diplomatik dan tekanan balik dari negara republik Indonesia menjadikan proses ini berlangsung sangat lambat dan tidak jarang terhambat. Jadi, dewan HAM PBB memiliki tanggung jawab penting terhadap situasi di Papua: sebagai pengawas, penyelidik, pemberi tekanan, dan fasilitator dialog. Namun peran itu tidak bisa dijalankan secara maksimal tanpa transparansi dan kerja sama dari negara anggota, serta dorongan kuat dari solidaritas masyarakat sipil internasional. Oleh karena itu, perjuangan keadilan bagi rakyat Papua harus terus dikawal oleh semua pihak yang percaya pada nilai-nilai universal hak asasi manusia.

5. Refleksi Etis: Tantangan dan ketidakadilan global Pada lokal Tanah papua

Papua adalah salah satu wilayah di Indonesia yang secara konkret memperlihatkan wajah paling nyata dari ketidakadilan global, khususnya dalam konteks eksploitasi sumber daya alam, marginalisasi masyarakat adat, serta pelanggaran hak asasi manusia yang berlarut-larut. Dalam arus globalisasi dan sistem kapitalisme internasional, Papua tidak diperlakukan sebagai subjek pembangunan yang bermartabat, melainkan sebagai objek eksploitasi ekonomi dan kepentingan geopolitik yang dikendalikan dari luar. Refleksi etis atas situasi ini bukan hanya

²⁸ Akankah Penambang Ilegal Di Korowai Dihukum Dan Dipaksa Membayar Denda Pernyataan [Pdt. Trevor Johnson.//2018

²⁹ Peran Lembaga Internasional Dalam Penegakan Hukum Humaniter Pada Konflik Timor Leste Dan Papua

³⁰ Torture In The Postcolony Of Papua, Indonesia. Amnesty International. (2022). *“Don’t Bother, Just Let Him Die”: Killing With Impunity In Papua.*

menyangkut dimensi lokal, tetapi juga mengarah pada struktur ketidakadilan yang berlangsung secara sistemik dan terorganisasi dalam skala global. Ini menuntut keberanian moral untuk tidak sekadar menganalisis, tetapi juga menggugat struktur kuasa yang melanggengkan penindasan terhadap rakyat Papua.

1. Ketimpangan Global dan Eksploitasi Lokal Papua adalah contoh paling telanjang dari ironi global

wilayah yang paling kaya akan sumber daya alam justru dihuni oleh rakyat yang paling miskin secara struktural. Emas, nikel, tembaga, kayu, dan gas bumi diambil dalam jumlah besar untuk kepentingan negara dan korporasi multinasional, namun masyarakat Papua hidup dalam keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan hak dasar lainnya. Dampaknya bukan hanya kerusakan ekologis, tetapi juga hilangnya tanah adat, identitas budaya, dan martabat masyarakat lokal. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap keadilan distributif, di mana manfaat ekonomi tidak dibagikan secara adil, dan keadilan ekologis, karena lingkungan dirusak tanpa tanggung jawab keberlanjutan.

2. Refleksi Etis atas Relasi Kuasa Global

Ketidakadilan di Papua tidak bisa dibaca hanya sebagai isu nasional. Ia adalah bagian dari rantai global yang melibatkan kekuatan ekonomi-politik internasional. Investasi asing, intervensi diplomatik, dan korporasi multinasional berperan aktif dalam memproduksi dan melanggengkan eksploitasi. Bahkan lembaga-lembaga keuangan internasional turut andil dalam skema pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat lokal. Dalam perspektif etika teologis maupun filsafat moral, sistem ini mengingkari nilai-nilai dasar seperti solidaritas kemanusiaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab atas ciptaan. Ketika tanah adat dirampas, suara masyarakat dibungkam, dan pembangunan dipaksakan dari luar, maka yang terjadi bukan sekadar pembangunan, melainkan kolonialisme dalam wajah baru kolonialisme ekonomi dan ekologis yang berlangsung atas nama kemajuan.

3. Krisis Moral dan Tanggung Jawab Kolektif Situasi di Papua mencerminkan krisis moral dunia

kemajuan teknologi dan kapitalisme tidak serta-merta membawa keadilan, tetapi malah memperlebar jurang antara pusat dan pinggiran, antara negara dominan dan masyarakat adat yang tersingkirkan. Refleksi etis yang jujur harus bertanya: Siapa yang

diuntungkan oleh proyek-proyek tambang dan infrastruktur di Papua? Siapa yang dikorbankan? Siapa yang dibungkam dalam proses ini? Di tengah keheningan banyak negara dan lembaga internasional, sejumlah suara profetik mulai muncul dari kawasan Pasifik, gereja-gereja sedunia, aktivis HAM, dan organisasi masyarakat sipil global yang menyuarakan penderitaan Papua di forum-forum internasional. Solidaritas ini menjadi penting, bukan hanya sebagai bentuk empati, tetapi sebagai tanggung jawab moral global untuk melawan ketidakadilan sistemik yang telah berlangsung terlalu lama.

KESIMPULAN

Konflik perampasan sumber daya alam di Papua merupakan cerminan dari ketidakadilan struktural yang telah lama dialami oleh rakyat Papua, di mana tanah, hutan, dan kekayaan alam mereka dieksploitasi tanpa persetujuan dan partisipasi yang adil. Seruan rakyat Papua bukan sekadar tuntutan hak atas tanah, tetapi juga panggilan moral untuk keadilan, pengakuan martabat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Respons solidaritas internasional menunjukkan bahwa perjuangan Papua tidak berdiri sendiri dukungan dari masyarakat global memperkuat legitimasi tuntutan rakyat atas hak hidup dan lingkungan yang lestari. Dalam konteks ini, Dewan HAM PBB memiliki peran penting untuk mendorong akuntabilitas negara dan memastikan bahwa pembangunan di Papua tidak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak asasi, melainkan melalui pendekatan damai, adil, dan berkelanjutan.

Masa depan Papua harus dibangun di atas prinsip keadilan ekologis, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan partisipasi aktif rakyat dalam menentukan nasibnya sendiri. Tanpa itu, pembangunan hanya akan melahirkan luka baru dan memperdalam krisis kemanusiaan di tanah Papua. Masa depan Papua hanya ada damai sejahtera melalui dengan keadilan yang sejati keadilan yang mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya, serta melibatkan mereka secara aktif dalam setiap proses pembangunan. Seruan rakyat Papua terhadap perampasan sumber daya adalah seruan untuk martabat, bukan sekadar ekonomi. Dukungan solidaritas internasional dan tanggung jawab Dewan HAM PBB menjadi kunci dalam mendesak negara agar menghentikan praktik eksploitatif dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Tanpa keadilan ekologis dan penghormatan terhadap suara

rakyat Papua, pembangunan hanya akan melanggengkan penderitaan dan menghapus harapan masa depan yang damai, adil, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bbc. "Papua: Pendulang Emas Berulang Kali Tewas Di Tengah Konflik Bersenjata Papua, Siapa Mereka Dan Mengapa Ada Di Tengah Hutan?" Bbc News Indonesia, April 21, 2025.
- Dahrif, Hariman. *Menyingkap Akar Kemiskinan Dalam Masyarakat Adat Papua Studi Kasus Masyarakat Byak*. Deepublish, 2019. <https://Repository>
- Ginting, Darwin. *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*. 2012.
- Ham, Komnas. *Laporan Kegiatan Seruan Global 2014: Hentikan Stigma Dan Diskriminasi Terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta Dan Anggota Keluarga Mereka*. Komnas Ham, 2014.
- Harsono, Andreas. "'If It's Not Racism, What Is It?' Office Of The High Commissioner For Human Rights (Ohchr). 'Un Human Rights Chief Urges Restraint And Dialogue To Address Papua Unrest.'" Human Rights Watch, September 18, 2024. <https://www.hrw.org>.
- Helmana, Amrudiaz. "Kedudukan Militer Dalam Dinamika Konflik Di Papua (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tni Dan Surat Telegram Rahasia Panglima Tni Nomor Str/41/2024)." Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Hernawan, Budi. "Torture In The Postcolony Of Papua, Indonesia." *Transcience* 15, No. 2 (2024): 2.
- I Wayan, Rai S. *Buku: Penciptaan Karya Seni Berbasis Kearifan Lokal Papua*. Edited By Ruastiti Ni Made. Institut Seni Budaya Indonesia (Isbi) Tanah Papua Dengan Penerbit Aseni (Anggota Ikapi Pusat), 2021. <http://Repo.Isi-Dps.Ac.Id>
- Karunggu, Yordan Nyamuk. "Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik." *Book-Professorline*, January 20, 2025.
- Kobak, Hulu. "Transformasi Gereja Papua Dalam Membangun Masyarakat Multikultural Yang Damai Dan Toleran." *Jurnal Media Sabda Biblika* 2, No. 1 (2025): 11–24.
- Kobak, Hulu, And Christian Seldjatem. "Analisis Terhadap Pandangan Pluralisme Dan Eksklusivisme Di Kalangan Gereja-Gereja Di Papua Pada Masa Kini." *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik*
- Kusuma, Nurul Rahmah, Ida Hamidah, And Nusantari Fitriani. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. 2022.
- Mahendra, Fransiscus Asisi, Cecep Kurniyawan, Tarsisius Susilo, Budiman Marpaung, And Budi Saroso. "Peran Lembaga Internasional Dalam Penegakan Hukum Humaniter Pada Konflik Timor Leste Dan Papua." *Journal Of Law And Nation* (2025): 2.

- Mampioper, Dominggus A, And Alberth Yomo. Antara Pengungsi Di Intan Jaya Dan Tambang Emas Di Blok Wabu | Jubi Papua. Polhukam. April 6, 2025. [Https://Jubi.Id](https://Jubi.Id)
- Maulidiyanti, Fatia, Juhari Sasmito, Aji Dkk, And Haris Azhar Dkk. Seperempat Abad Reformasi: Catatan Kritis Tentang Ham, Sumber Daya Alam, Dan Politik. 2024.
- Odiyaiwuu.Com. “Berita Utama: Jaringan Bahlil Dan Keluarga Papua Dalam Bisnis Nikel Raja Ampat.2025.
- Odiyaiwuu.Com. “Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Segera Cabut Izin Pt Gag Nikel Di Raja Ampat.” Odiyaiwuu.Com | Membahagiakan Kehidupan,2025. [Https://Www.Odiyaiwuu.Com](https://Www.Odiyaiwuu.Com)
- Pamungkas, Cahyo, And Suma Riella Rusdiarti. Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, Dan Diaspora Papua. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Penulis, Tim, Ahmad Khoirul Umam, Adrian Azhar Wijanarko, Et Al. Tantangan Integritas Bisnis Tambang Di Indonesia. 2020. [Https://Repository.Paramadina.Ac.Id](https://Repository.Paramadina.Ac.Id)
- Resubun, Mariana Lusia. Jangan Rusak Rumah Ku: Save Papua. Nomaden Institute, 2017.
- Sahanda, Dimas Hutomo. Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Negara-Negara Di Kawasan Pasifik Selatan Terkait Organisasi Papua Merdeka. 2020. [Https://](https://)
- Sary, Novytha. “Tinjauan Ham Internasional Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan).” Other, Universitas Hasanuddin, 2022. [Https://Repository](https://Repository)
- Seputarpapua. “Akankah Penambang Ilegal Di Korowai Dihukum Dan Dipaksa Membayar Denda?” Seputarpapua.Com, August 16, 2018.
- Sudira, I Nyoman, Cahyo Pamungkas, Fachri Aidulsyah, Elvira Ramkabu, And Yuliana Langowuyo. Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua. 2020.Pdf
- Susanna, Susanna, And Syamsul Rijal Syamsul Rijal. “Etika Ilmuwan Dalam Kerangka Filsafat Ilmu: Analisis Dan Implikasi.” Jurnal Ikhtibar Nusantara 3, No. 1 (2024)
- Ulim, Aida, And Aryo Wisanggeni G. “Mahasiswa Intan Jaya Tolak Rencana Antam Menambang Blok Wabu | Jubi Papua.” 2025. [Https://Jubi.Id/Polhukam/2025](https://Jubi.Id/Polhukam/2025)
- Wisesa, Agastya Pandu. Peranan Aktor Internasional Dalam Melanggengkan Siklus Kekerasan Negara Terhadap Kelompok Subaltern: Studi Kasus Gerakan Separatis Papua Barat. 2023.
- Yanto, Andri, Fadila Salbilla, And Risky Carmil Sitakar. “Implikasi Desentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung.” Jurnal Interpretasi Hukum